Perubahan Peraturan KPK

Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Wilayah Kalimantan Timur

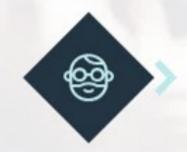












Perubahan Per. KPK No. 07 Tahun 2016



Monitoring dan
Evaluasi Pelaporan
LHKPN 2019



Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Sebagaimana telah diubah dengan

Perubahan Terakhir Peraturan KPK No.02 Tahun 2020



DEFINISI



KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG



TANDA TERIMA



PENGUMUMAN

PERUBAHAN DEFINISI



Peraturan KPK 07/2016	Peraturan KPK 02/2020
Definisi Suami/Istri : tidak ada	Definisi Suami/Istri : ada
Definisi Anak Tanggungan : tidak ada	Definisi Anak Tanggungan : ada
Definisi Tanda Terima : tidak ada	Definisi Tanda Terima : ada

Istri/Suami:

Terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Anak Tanggungan

Anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang masih dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.

Tanda Terima

Dokumen yang diberikan KPK sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK.



KELENGKAPAN DOKUMEN

Dokumen	Peraturan KPK 07/2016	Peraturan KPK 02/2020
Surat Kuasa Perbankan (Lamiran 4)	Wajib (1x)	Wajib (1x)
Salinan Dok. Kepemilikan Harta Kekayaan pada Lembaga Keuangan	Wajib	Dihapuskan





TANDA TERIMA LHKPN

Peraturan KPK 07/2016

Terdapat dua macam Tanda Terima:

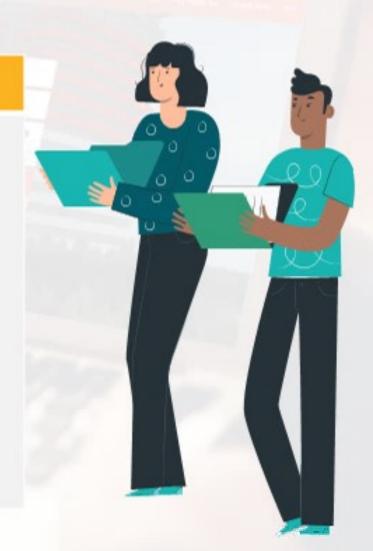
- a) Tanda Terima Lengkap; dan Terima Lengkap.
- b) Tanda Terima Tidak
 Lengkap.

keuangan

Tanda Terima Tidak Lengkap
Diberikan apabila terdapat
kekurangan dokumen bukti
kepemilikan harta pada lembaga

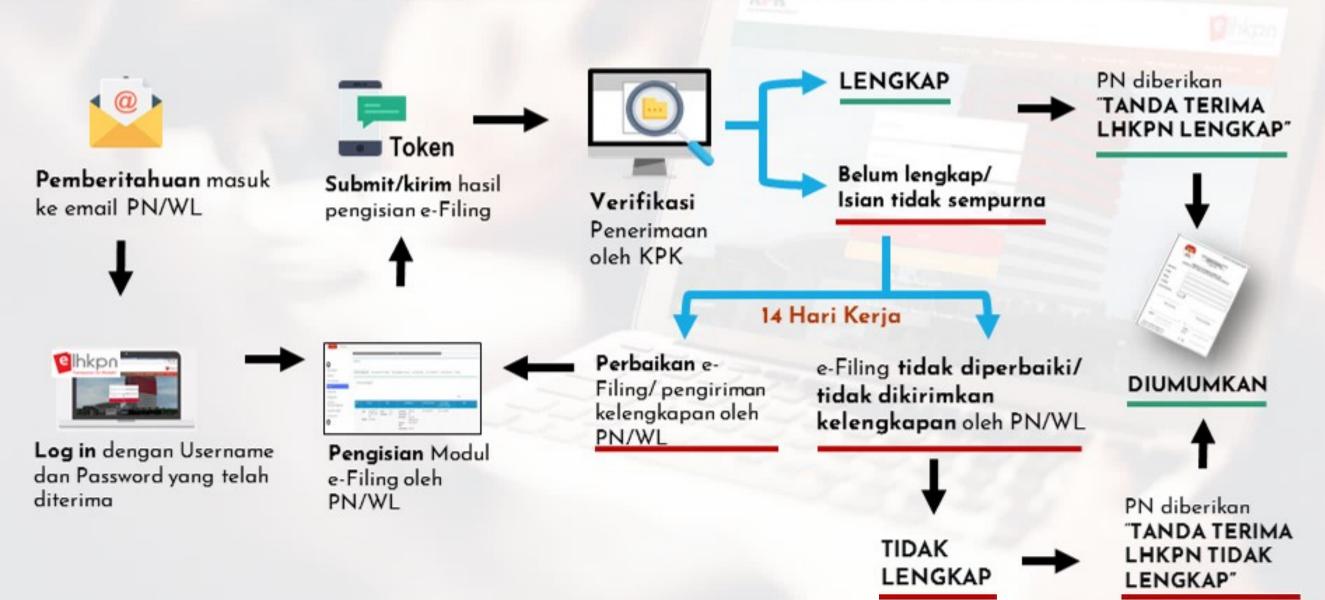
Peraturan KPK 02/2020

Hanya terdapat satu macam Tanda Terima yaitu **Tanda Terima Lengkap**.



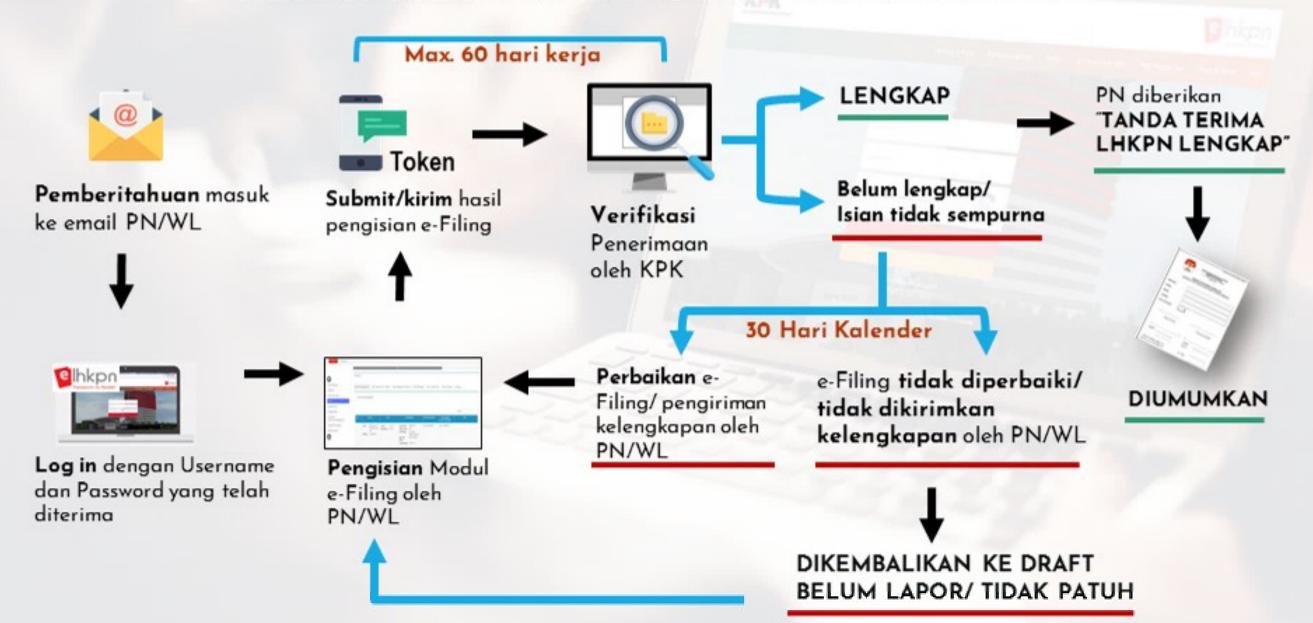
ALUR LHKPN PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016





ALUR LHKPN PERATURAN KPK NO. 02 TAHUN 2020

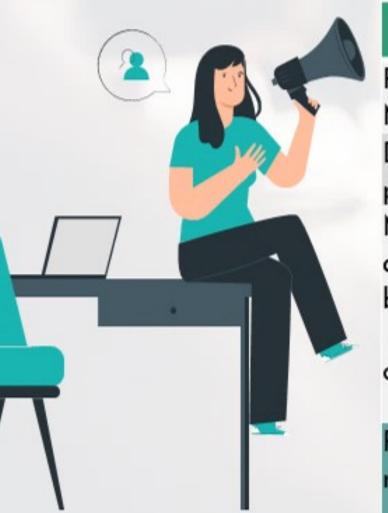






PENGUMUMAN





Peraturan KPK 07/2016	Peraturan KPK 02/2020
PN memberikan Surat Kuasa	PN tidak perlu memberikan
Mengumumkan;	Surat Kuasa Mengumumkan;
Diumumkan 2 bulan setelah penyampaian LHKPN;	Diumumkan 2 bulan setelah PN menerima Tanda Terima;
Media pengumuman pada: a) Media pengumuman KPK;	Media pengumuman pada Media pengumuman KPK;
b) Media pengumuman resmi instansi; dan/atau	
c) Surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.	
Format naskah pengumuman	Format naskah pengumuman
menjadi Lampiran PKPK	tetap menjadi lampiran namun disesuaikan

MASA TRANSISI PERUBAHAN PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016



LHKPN yang disampaikan pada Tahun 2020 tetap diverifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 PKPK No. 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.





Monitoring dan Evaluasi Pelaporan LHKPN 2019

PER 13 SEPTEMBER 2020



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

90.93%

KEPATUHAN

90.91%

KEPATUHAN

81.81%

%KELENGKAPAN

100.00%

%KELENGKAPAN

WL

= 816 Orang

Terverifikasi = 607 Orang

Lapor

WL

= 55 Orang

= 50 Orang

Terverifikasi = 50 Orang

Lapor

= 742 Orang

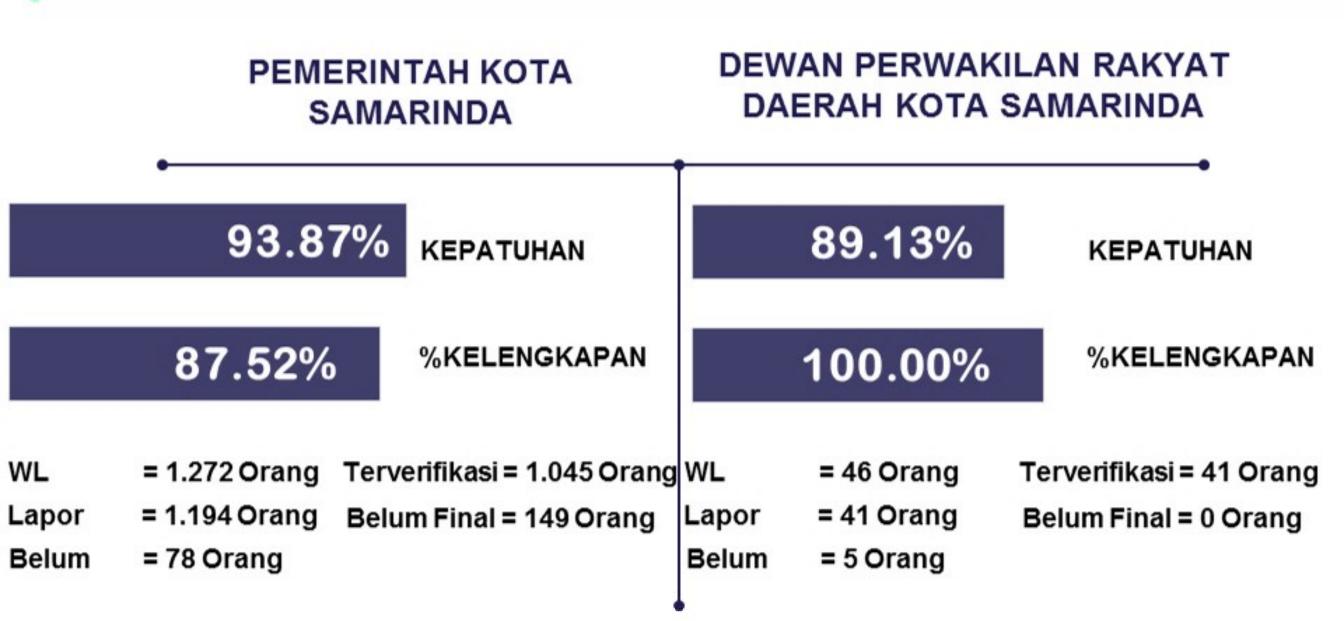
Belum Final = 135 Orang

Belum = 5 Orang

Belum Final = 0 Orang

Belum

= 74 Orang





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

100.00%

KEPATUHAN

100.00%

KEPATUHAN

86.20%

%KELENGKAPAN

84.00%

%KELENGKAPAN

WL

= 500 Orang

= 500 Orang

Terverifikasi = 431 Orang

Lapor

WL

= 25 Orang

= 25 Orang

Terverifikasi = 21 Orang

Belum

Lapor

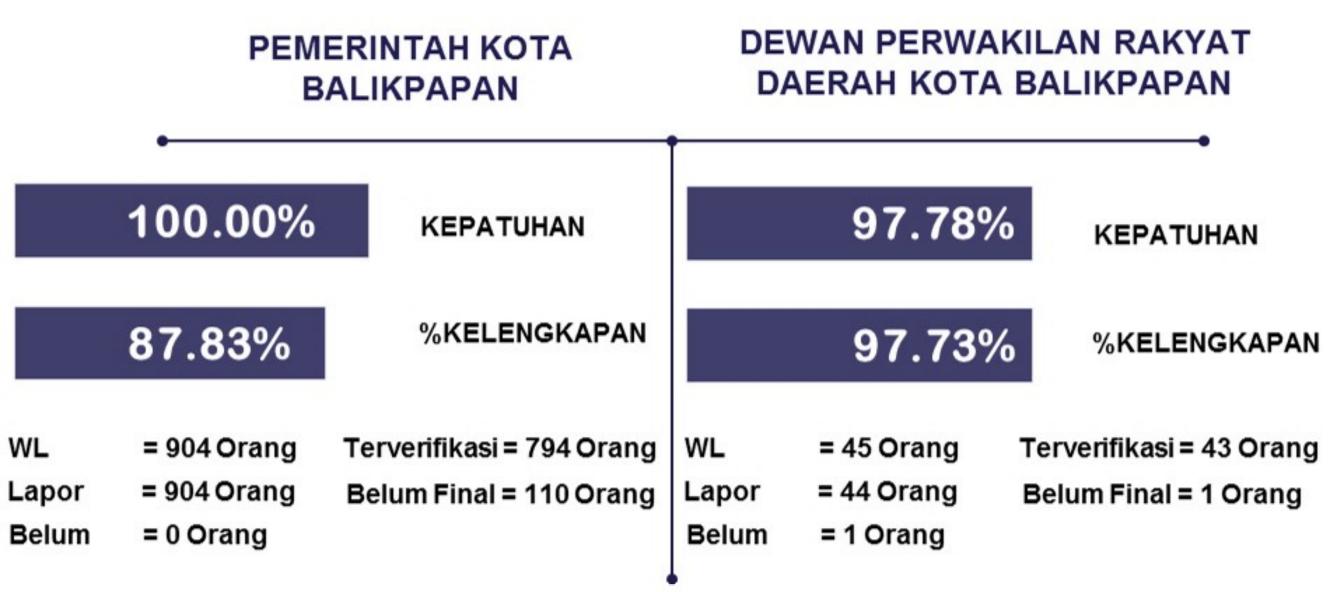
= 0 Orang

Belum Final = 69 Orang

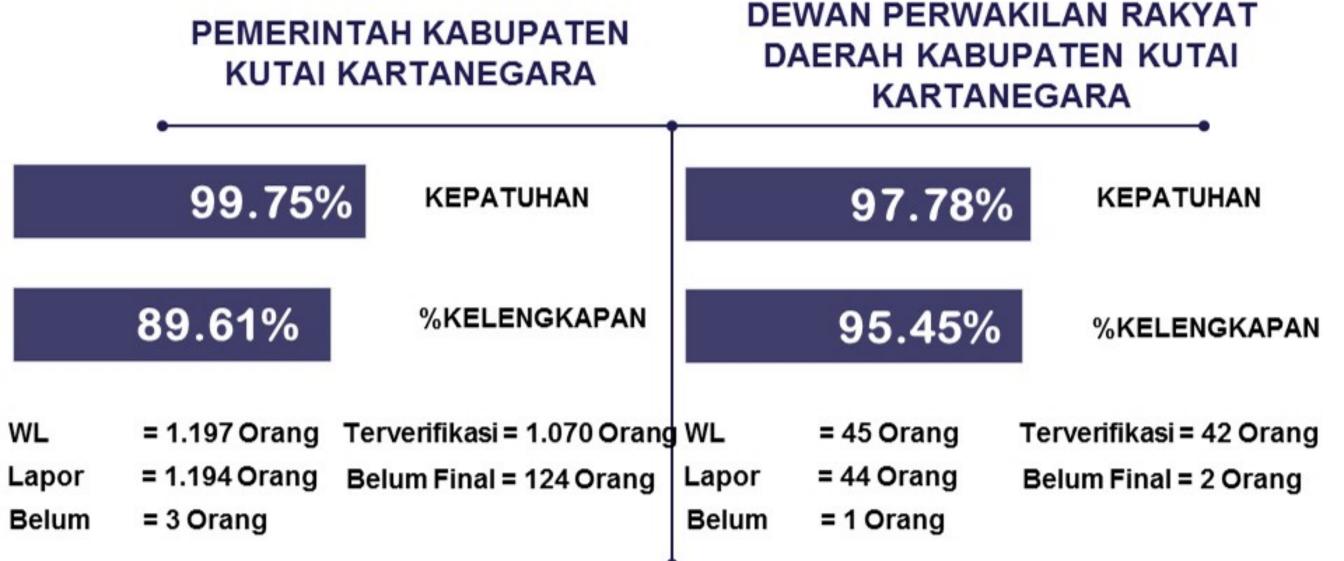
Belum = 0 Orang

Belum Final = 4 Orang







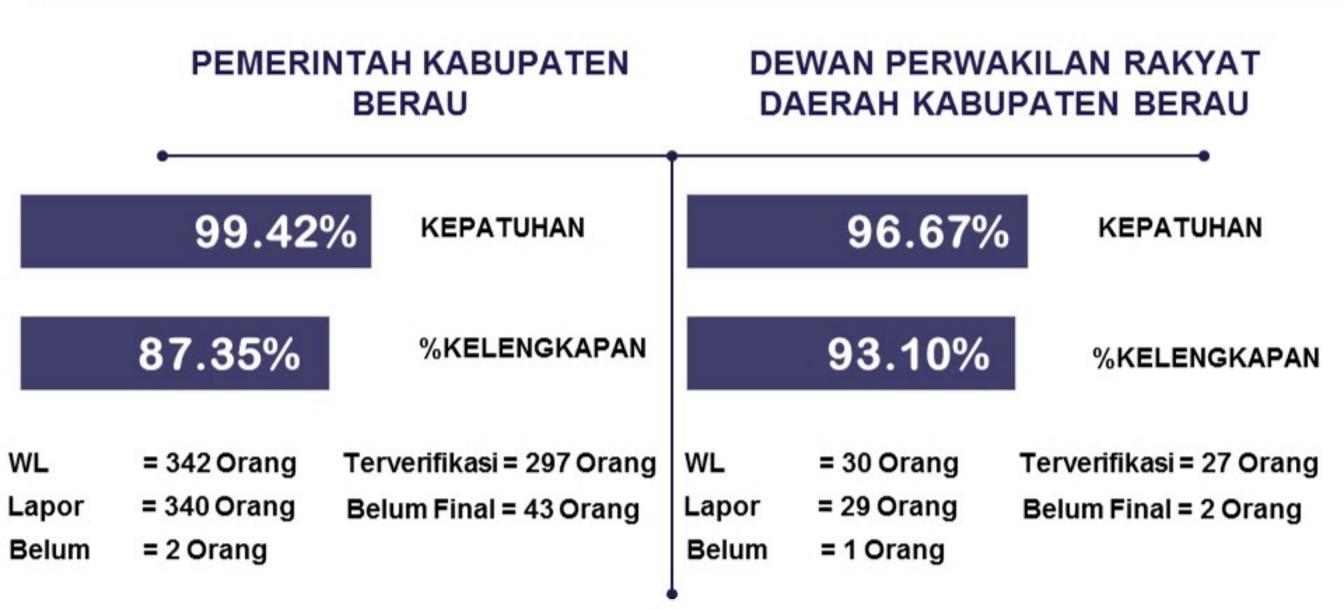


WL

Lapor







PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

41.11%

KEPATUHAN

100.00%

KEPATUHAN

29.73%

%KELENGKAPAN

85.00%

%KELENGKAPAN

WL

= 90 Orang

Terverifikasi = 26 Orang

Lapor

WL

= 20 Orang

= 20 Orang

Terverifikasi = 17 Orang

Lapor Belum = 37 Orang

= 53 Orang

Belum Final = 11 Orang

Belum = 0 Orang

Belum Final = 3 Orang

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

PT MIGAS MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR (PERSERO)

100.00%

KEPATUHAN

50.00% KEPATUHAN

95.65%

%KELENGKAPAN

100.00% **%KELENGKAPAN**

WL = 46 Orang Terverifikasi = 44 Orang

Lapor

= 46 Orang

Belum Final = 2 Orang

WL

Lapor

= 8 Orang

= 4 Orang

Terverifikasi = 4 Orang

= 4 Orang Belum

Belum Final = 0 Orang

Belum

= 0 Orang

PDAM KOTA BALIKPAPAN

92.31%

KEPATUHAN

91.67%

%KELENGKAPAN

WL = 13 Orang

Terverifikasi = 11 Orang

Lapor = 12 Orang

Belum Final = 1 Orang

Belum = 1 Orang

